

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- _____, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, RajaGrafindo, Jakarta, 2002.
- Ashari Azis Samudra, *Perpajakan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- B. Boesiono, *Perpajakan Indonesia*, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Baron, Robert A., Donn Erwin Byrne, *Social Psychology*. 9th Edition. Pinter in The United State Of America, 2000.
- Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Fandi Tjipto, *Total Quality Management*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994.
- H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- _____, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Cet.2, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- H.A.W Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Hadi Irmawan, *Pengantar Perpajakan*, Bayu Media, Malang, 2006.
- Harsono, *Hubungan Atas dasar Pola Kemitraan Instansi Fungsional*, Penerbit Dian Rana Salatiga, 2000.
- Joko Widodo, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001.
- M. Nur Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*. Ed.3, Cet. 1. Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2011.

- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi 1-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- _____, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Mustofadidjaja, *Manajemen Proses Kebijakan Publik*, Duta Pertiwi, Jakarta, 2003.
- Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah*, INSIST Press, Yogyakarta, 2000.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1993.
- Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung, 1990.
- Rondinelli, Deniis A and Shabir Cheema G, *Implementing Decentralization Policies: An Introduction in Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publication, Beverly Hills, 1983.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Sarundajang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Siahaan, Marihot P, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010,
- Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2013.
- Tunggul Anshari Setia Negara, *Ilmu Hukum Pajak*, Setara Press, Malang, 2017.
- W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2016.

C. Sumber Lain

A. Fatir Lukman, dkk, *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Samsat Kota Makassar)*, Bahan Ajar Mata Kuliah PPKn FIS Universitas Negeri Makassar.

Etika Hartatik, *Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Bogor*, Tugas Akhir, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan, Bogor, 2013.

Hasnia Basir, *Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Wilayah Gowa*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Iin Surminah, *Pola Kerjasama Lembaga Litbang Dengan Pengguna Dalam Manajemen Litbang (Kasus Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat)*, Jurnal Bina Praja, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2013.

Jafar Nurdin Siradjah, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Samsat Wilayah Maros*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Satriya Nugraha, *Hubungan Antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakkan Ketertiban Masyarakat*, Jurnal Morality, Juni 2018, Volume 4 Nomor 1.

Wiwiet Hertiarani, *Implementasi Kebijakan E-Samsat di Jawa Barat*, Inspektorat Pengawasan Kepolisian Daerah Jawa Barat.